

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan

- a. Jumlah angka buta huruf masih tinggi
- b. Masih adanya masyarakat buta huruf yang sudah dientaskan menjadi buta huruf kembali;
- c. Rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah kejuruan
- d. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
- e. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum

2. Bidang Urusan Kesehatan

- a. Belum terlindunginya masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan
- b. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
- c. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi

3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

- a. Tingginya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama pada media air sungai utama Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas, yang ditunjukkan oleh hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas pada Tahun 2012, khususnya pada parameter BOD yakni sebesar 3,67 mg/l yang berarti masih belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air yakni sebesar 2 mg/l.
- b. Rusaknya kawasan konservasi Tahura R. Soeryo dan sekitar sumber air S. Brantas, termasuk keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis Tahura R. Soeryo yang sampai dengan awal Tahun 2012 masih sekitar 2.675 Ha. Selain itu kondisi DAS Brantas yang semula memiliki 1.577 sumber air dan yang berada di Malang Raya

- sejumlah 467, saat ini yang berfungsi hanya 230, serta yang berada di Kota Batu 118 yang berfungsi hanya 57 sumber air.
- c. Selain itu juga rusaknya beberapa kawasan hutan karena pembalakan liar dan alih fungsi yang mengakibatkan lahan kritis, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis di luar kawasan hutan sampai dengan awal tahun 2012 masih sekitar 213.086 Ha, dan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Jawa Timur.
- d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim, pada berbagai kegiatan yang berpotensi sebagai sumber Emisi GRK, yaitu pertanian, kehutanan, transportasi, energy, industry dan limbah. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK, maka Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 2011 – 2020. Fokus utama RAD GRK Provinsi Jawa Timur adalah inisiatif lokal, kesesuaian konteks, dan tindakan. Proses penyusunan RAD GRK dilakukan dengan berdasar kepada basis teknis dan ilmiah yang kuat dengan pengayaan dari *stakeholder* pembangunan. Pelibatan pelaku-pelaku pembangunan ini dimaksudkan agar substansi RAD GRK yang dihasilkan kemudian dapat didukung implementasinya. Penyusunan RAD GRK berdasarkan kesesuaian dengan RPJP, RPJM Provinsi Jawa Timur dan juga RAN-GRK yang merupakan proses *bottom-up* dan menggambarkan langkah yang akan ditempuh dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk masing-masing sektor (pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah) melalui perhitungan seberapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan target pengurangannya.
- e. Bencana Alam
- 1) Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam; Banyak wilayah Jawa Timur yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (*early warning system*), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting dan dukungan pemahaman

akan “kawasan rawan bencana geologi” (Geological Hazards Mapping) perlu dipetakan secara baik sehingga rencana tata ruang yang disusun dan pola pembangunan kota disesuaikan daya dukung lingkungan lokal;

- 2) Banyaknya desa rawan bencana yang masih belum dibentuk sebagai Desa Tangguh, karena pihak Kab/Kota belum peduli;
- 3) Masih rendahnya pengetahuan di sekolahan akan Penanggulangan bencana, karena masih banyak sekolah yg belum dilatih dan keterbatasan pendanaan.

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Sumber Daya Air

- 1) Turunnya daya dukung area resapan air (run off yang berlebihan)
- 2) Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air
- 3) Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu ke waktu
- 4) Lambatnya progres Pembebasan tanah pada lahan milik perhutani;
- 5) Meningkatnya lahan Kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS
- 6) Tingginya Laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis

b. Kebinamargaan

- 1) Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan, baik jalan Nasional Tol/Non Tol dan Flyover serta Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Keterbatasan alokasi pembiayaan penambahan panjang jalan provinsi;
- 3) Kejenuhan jalan klianak-tambak osowilangun yang menjadi akses ke Pelabuhan Teluk Lamong

c. Infrastruktur Permukiman

- 1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
- 2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan
- 3) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage),

- 4) Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan

5. Bidang Urusan Penataan ruang

a. Kesenjangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan perkotaan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidak sesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

6. Bidang Urusan Perumahan

- a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau,
- b. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan,
- c. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan.

7. Bidang Urusan Kepemudaan dan olah raga

- a. Masih rendahnya kualitas pemuda.
- b. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya.
- c. Masih kuranya sarana prasarana olah raga di daerah.
- d. Masih rendahnya kualitas atlit

8. Bidang Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya promosi investasi,
- b. Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kabupaten / kota se Jawa Timur,

- c. Masih lambatnya realisasi investasi; dan
- d. Masih sedikitnya investasi di industri hilir.

9. Bidang Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM antara lain :

- a. Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM. (Existing : dari 8.506 kopwan telah 3.000 Kopwan berprestasi diperkuat permodalannya, 1.521 Koppontren telah terfasilitasi 400 koppontren, dan dari 1.274 Kopkar telah terfasilitasi 20 Kopkar).
- b. Belum optimalnya kelembagaan koperasi (dari 29.145 koperasi 3.966 (13,7%) tidak aktif).
- c. Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan. (Dari 709 KUD, hanya sebagian kecil yang berperan dalam pengadaan pangan belum maksimal).
- d. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.

10. Bidang Urusan Kependudukan dan catatan sipil

- a. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- b. Masih perlunya menekan angka pertumbuhan penduduk agar tercipta kualitas penduduk yang memadai sebagai generasi penerus bangsa.

11. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

- a. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
- b. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.

12. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79), fluktuasi harga bahan pangan, masih adanya daerah / desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

13. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

- a. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
- c. Masih lemahnya kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender;
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT;
- e. Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender;

14. Bidang Urusan Perhubungan

- a. Banyaknya jumlah orang ke luar negeri karena biaya transportasi semakin murah dan terjangkau
- b. Timbulnya permasalahan yang kompleks dan sistematis dibidang transportasi Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan akibat bertambahnya populasi penduduk dan semakin cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
- c. Terlampauinya batas ideal kapasitas jarak /Headway antara pesawat yang landing dan take-off sudah 1 menit 20 detik dari ideal 3 menit di Bandara Enclave Juanda
- d. Mendesaknya kebutuhan pengembangan Bandara Juanda Sipil/Komersial di lokasi lain di Jawa Timur sebagai antisipasi cepatnya pengembangan wilayah di perkotaan;
- e. Belum effisiennya angkutan Barang dari dan antar pelabuhan;
- f. Pembangunan Kawasan Pergudangan Modern dan Perkantoran serta Fasilitas Bongkar Muat Di Area Reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo
- g. Terhentinya pendalaman dan pelebaran Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) akibat lambatnya proses pendanaan;
- h. Belum optimalnya Pemanfaatan Kerjasama Barang Milik Daerah (Provinsi) di Pelabuhan dan Bandara.
- i. Mendesaknya kebutuhan angkutan masal BRT di Kawasan Aglomerasi GKS dan Malang Raya;

- j. Perpanjangan Jalur Rel Kereta Api Double Track dari Bojonegoro - Surabaya (Pasar Turi) menjadi Bojonegoro - Surabaya (Pasar Turi-Dermaga Tj. Perak) - Probolinggo (Pelabuhan Tj. Tembaga) - Banyuwangi (Pelabuhan Tj. Wangi)

15. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan bentang geografis Jawa Timur yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*digital device*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa (terpencil) khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia.

Selanjutnya terkait dengan media elektronik yang ada di Jawa Timur, Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan masih pada lembaga penyiaran televisi sehingga masih belum bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap radio yang masih belum optimal. Disamping itu sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (Monitoring Isi Siaran) masih terbatas dan sangat sederhana;

16. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan serta pemahaman dalam proses politik
- c. Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- d. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan keteriban.

17. Bidang Urusan Pemerintahan Umum

- a. Belum keseluruhan batas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan perapatan pilar untuk memastikan batas daerah
- b. pengumpulan data agregasi pada LPPD abupaten/Kota tidak sinkron dengan data yang ada pada SKPD Provinsi Jawa Timur pelaksanaan urusan wajib dan pilihan
- c. Terlambatnya permasalahan administrasi yang menghambat proses fasilitasi pilkada;
- d. Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan Administrasi Desa berbasis Ilmu Teknologi (IT);
- e. Program kerja sama antar SKPD antar Provinsi yang disepati dalam MPU kurang berjalan optimal;
- f. Banyak kasus-kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor) di Kabupaten/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
- h. Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan PNS;
- i. Belum semua pelaksana atau pengelola kepegawaian memahami ketentuan dan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.

18. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

- a. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatiba pemberdayaan masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Kurangnya komitmen penentu kebijaksanaan terhadap penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

19. Bidang Urusan Sosial

- a. Masih terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS, tingginya angka penyalagunaan narkoba dan makin meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS;
- b. Masih rendahnya manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bidang penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

20. Bidang Urusan Kebudayaan

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
- b. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.

21. Bidang Urusan Arsip

Kurangnya sosialisasi serta bimbingan teknik teknik tentang kearsipan.

22. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. Terbatasnya sarana prasarana alat tangkap nelayan;
- c. Menurunnya potensi Sumberdaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Timur,
- d. Masih rendahnya Kualitas benih dan induk;
- e. Tingginya Harga pakan ikan pabrikan;
- f. Masih rendahnya Mutu dan hasil tangkapan kualitas mutu komoditas ekspor dengan *Cold Chain System (CCS)* belum optimal;
- g. Tingginya tingkat abrasi pantai.

23. Bidang Urusan Pertanian

Permasalahan pada bidang urusan pertanian antara lain:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- b. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif;
- c. Masih rendahnya daya saing produk pertanian;
- d. Belum optimalnya peran kelembagaan petani dan penyuluh pertanian;
- e. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
- f. Rendahnya kandungan bahan organik tanah;
- g. Terbatasnya ketersediaan pakan dan teknologi;

- h. Masih terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI;
- i. Jatuhnya harga gabah pada saat panen;
- j. Kesulitan bahan pangan pada saat paceklik;
- k. Peningkatan kebutuhan dan konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman;
- l. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo;
- m. Masih adanya lahan kritis di dalam kawasan Tahura dan di Luar Tahura R. Soerjo.

24. Bidang Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

- a. Ketergantungan akan bahan bakar fosil mengakibatkan menipisnya pasokan energi dan perlunya pengembangan Energi Baru dan Terbarukan seperti biogas, air, panas bumi, surya, dan angin. Tingkat elektrifikasi di Jawa Timur masih rendah yaitu 75,56 %, sehingga masih 24,44 % penduduk di Jawa Timur yang belum berlistrik, sedang untuk pengembangan listrik dengan pembangkit energi alternatif memerlukan biaya cukup besar.
- b. Keterbatasan suplai energy dari jaringan listrik PLN, mengakibatkan beberapa desa/dusun di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan. di Jawa Timur belum berlistrik. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah permukiman tersebut jauh dari jangkauan infrastruktur/jaringan PLN dan jumlah calon pelanggan tidak signifikan atau terlampaui sedikit.
- c. Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah Pusat dan adanya surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penghentian sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru.
- d. Terdapat kegiatan pertambangan dan pengambilan air tanah yang belum berijin dan tidak sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat, serta indikasi meningkatnya intensitas pengambilan air tanah., yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
- e. Berdasarkan karakteristik geologi, geografi dan morfologi wilayah, terdapat wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur yang sulit air karena dari sisi jumlah dan penyebarannya kurang memiliki potensi air tanah.

- f. Berdasarkan pada kerangka geologi secara regional dan sifat litologinya serta faktor lainnya, Jawa Timur Jawa Timur memiliki beberapa gunung berapi aktif, seperti Gunung Kelud, Bromo, Semeru dan Raung, yang berpotensi menimbulkan bencana alam geologi seperti gempa bumi gerakan tanah, gunung meletus dan tsunami. Namun data geologi lingkungan belum lengkap dan terdapat kerusakan situs geologi.

25. Bidang Urusan Industri

Permasalahan pada urusan industri antara lain:

- a. Masih tingginya impor bahan baku/penolong (dimana pada tahun 2011 : 84,15% sedang pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,34%),
- b. Kurangnya keterkaitan Struktur Industri, antara Industri Hulu, Antara dan Hilir, yang terindikasi dari kecilnya (23,63%) komoditas unggulan daerah dengan daya penyebaran dan daya kepekaan tinggi.
- c. Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif.
- d. Ancaman penurunan produksi dan penutupan pabrik rokok (kontributor tertinggi sub sektor Industri Pengolahan di Jatim) akibat penerapan PP 109/2012,
- e. Kurangnya sinergitas input pendorong industri dan jasa nasional (MP3EI) di Jawa Timur.

26. Bidang Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan antara lain:

- a. Kurang lancarnya logistik ekspor-impor;
- b. Turunnya kinerja ekspor non-migas (-16,3 % dibanding tahun 2011) sebagai akibat krisis finansial global di Uni Eropa dan Amerika;
- c. Antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;
- d. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan regional;
- e. Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- f. Rendahnya harga jual komoditas tertentu di saat over supply ketika panen raya;

- g. Inefisiensi konektivitas perdagangan antar pulau dan asimetri informasi pada wilayah mitra dagang antar provinsi (24 Kantor Perwakilan Dagang).

27. Bidang Urusan Ketransmigrasian

- a. Kurangnya Minat masyarakat Jawa Timur untuk memperbaiki perekonomian melalui program transmigrasi;
- b. Masih ditemukan kendala terkait kesiapan daerah penempatan transmigrasi yang menyebabkan keterlambatan pemberangkatan transmigran.

2.4 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Isu strategis Jawa Timur terkait infrastruktur terdiri dari:

1. Potensi terjadinya kecelakaan penerbangan (Hazzard) akibat tingginya kepadatan lalu-lintas Sisi Udara Bandara Juanda Enclave yang sudah mencapai 1 menit 20 detik serta ineffisiensi dari maskapai penerbangan akibat kurangnya kapasitas runway dan taxiway.
2. Dibutuhkan Pengembangan Bandara Internasional Sipil/komersial yang lebih luas sebagai Multiple Airport melalui investasi swasta (KPS) dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengantisipasi pertumbuhan perkotaan wilayah Surabaya-Sidoarjo.
3. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa
4. Peningkatan efisiensi distribusi angkutan barang melalui perpanjangan Rel Kereta Api Double Track Dari dermaga pelabuhan Tj. Perak menuju Pelabuhan Tj. Tembaga Probolinggo, hingga Pelabuhan Tj. Wangi yang perlu segera di masukkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
5. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan.

6. Peningkatan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Provinsi) berupa Pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan Pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, pembangunan VVIP di terminal di Bandara Abd Saleh serta pengembangan kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah.
7. Kebutuhan akan pertambahan panjang jalan Nasional (Tol dan Non Tol), Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota.
8. Percepatan pembangunan Flyover yang sudah dilakukan pengukuran dan menjadi perhatian masyarakat namun belum ada tindak lanjut, seperti Flyover Medaeng, Flyover Perempatan Raya Gedangan, Flyover Pasar Induk Agrobisnis dan Flyover Kertosono.
9. Peningkatan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur terkait percepatan penggantian penggunaan lahan perhutani tuntas 2016;
10. Peningkatan dan pembangunan jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan kepelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak.
11. Percepatan Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu.
12. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan realistis dan strategis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan Geomembran.
13. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
14. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota.
15. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, Lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.